**Budaya politik Partisipan**

Merupakan budaya politik yang sangat ideal. Dalam budaya politik partisipan individu atau masyarakat telah memiliki perhatian, kesadaran, minat serta peran politik yang sangat luas.Masyarakat mampu memainkan peran politik baik dalam proses input ( yang berupa pemberian tuntutan dan dukungan terhadap sistem politik ) maupun proses output ( pelaksanaan, penilaian,dan pengkritik setiap kebijakan dan keputusan politik pemerintah.

**Ciri- ciri budaya politik Partisipan  :**

a.   anggota masyarakat sangat berpartisifasif terhadap semua obyek politik, baik menerima atau menolak suatu obyek politik

b.   kesadaran bahwa masyarakat adalah warga negara yang aktif dan berperan sebagai aktivis

c.   warga negara menyadari akan peran, hak , kewajiban  dan tanggung jawabnya selaku warganegara

d.   tidak menerima begitu saja keadaan,tunduk pada keadaan,berdisiplin, tetapi dapat menilai dengan penuh kesadaran semua obyek politik.

e.   Warga harus mampu bersikap terhadap masalah atau  isu politik

f.    Warga memiliki kesadaran untuk taat pada peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan tanpa perasaan tertekan.

**Contohnya budaya politik partisipan** seperti membayar pajak tepat pada waktunya, mengikuti pemilu dengan menggunakan haknya sebagai warga Negara, mentaati peraturan lalu lintas dll .

**Upaya untuk menerapkan budaya politik partisipan adalah dengan cara :**

1.   Agar memiliki pengetahuan dan kepekaan terhadap masalah atau isu politik,kita membiasakan diri membaca dan melihat berita, dan

berbicara tentang masalah politik di sekitar kita.

2.   Agar mampu bersikap dan menilai obyek politik, kita bisa membiasakan untuk berpendapat, berkomentar, jika ada isu politik yang muncul.

3.   Berlatih memberi usulan, masukan, dan kritikan terhadap suatu kebijakan

4.   Membiasakan diri untuk taat dan patuh pada peraturan yang memang telah disepakati



Negara yang demokratis memiliki keunggulan tersendiri, karena dalam setiap pengambilan kebijakan mengacu pada aspirsi masyarakat. Masyarakat sebagai tokoh utama dalam sebuah Negara demokrasi memiliki peranan yang sangat penting. Salah satu peranan masyarakat dalam Negara demokrasi adalah partisipasi masyarakat dalam politik dalam hal ini pemilihan umum. Masyarakat memiliki peran yang sangat kuat dalam proses penentuan eksekutif dan legislatif baik dipemerintah pusat maupun daerah. Oleh karena itu perlu pendidikan politik yang harus diketahui oleh masyarakat agar pada saat pelaksaan pemilihan umum masyarakat tidak asal pilih dan hanya ikut-ikutan saja. Pendidikan politik yang baik akan menciptakan masyarakat yang cerdas sehingga masyarakat akan dapat memilih dengan baik pemimpin mereka. Dengan demikian keinginan dan harapan masyarakat dapat dilaksanakan oleh pemerintah melalui kebijakannya.

|  |
| --- |
|  |

         Dalam proses pelaksaan pesta demokrasi yakni pemilihan umum, pemerintah telah membentuk lembaga khusus yang menangani pelaksanaan pemilihan umum baik administratif maupun teknis. Lembaga pemerintah tersebut adalah KPU yaitu komisi pemilihan umum yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemilihan umum baik tingkat nasional, provinsi atau kabupaten / kota di Indonesia. Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Meskipun pemerintah telah membentuk lembaga penyelenggara pemilihan umum,  kendala yang dihadapi komisi pemilihan umum juga tidak sedikit, mulai dari anggaran, sistem pemilihan umum, partisipasi masyarakat, politik dan berbagai pelanggaran pada pelaksanaan pemilihan umum. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam proses pemilihan umum, karena masyarakat sebagai penentu dalam kesuksesan pelaksanaan pemilihan umum.

Peran parati politik sangat diharapkan untuk meredam konflik yang terjadi dimasyarakat. Partai politik bertanggungjawab atas peserta pemilu yang dicalonkan dalam artian sebagai penengah.Sebaiknya partai politik dalam menentukan calon peserta pemilihan umum yang akan disusung jangan hanya berorientasi pada uang saja, tetapi melihat kemampuan dan potensi yang dimiliki calon tersebut**.**Apabila dalam proses seleksi calon dilakukan dengan baik dan benar maka dunia politik Indonesia akan bersih dan bebas korupsi. Selain itu, hal tersebut juga akan membuat partai lebih sehat dalam artian proses pengkaderan dan penggerakan organisasi akan lebih baik karena diisi oleh kader yang benar-benar mencintai pertai dan sudah lama mengetahui permasalahan dan budaya dalam partai tersebut. Bukan hanya sebagai kader numpang nama untuk sebuah jabatan saja.